

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik, dan kebutuhan pendidik agar responsif terhadap persyaratan yang diberikan kepada masyarakat. Kebutuhan di sini didefinisikan sebagai perbedaan antara apa yang ada dan apa yang dibutuhkan, definisi yang menunjukkan bahwa kebutuhan adalah perbedaan atau jarak yang dapat diukur antara keadaan atau kondisi saat ini dan apa yang harus dipenuhi. Salah satu tantangan dalam pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang lebih matang dan berkualitas dengan kemampuan yang komprehensif, dibutuhkan peran semua elemen bangsa.

Kebijakan terkait sistem pendidikan diputuskan untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Kebijakan secara menyeluruh harus berkorelasi dengan pembudayaan dalam lingkungan sekolah. Hal ini penting karena lembaga pendidikan (sekolah) menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia juga sebagai miniature masyarakat. Dengan demikian, peran penting pendidikan senantiasa harus meningkat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi di era kecerdasan teknologi buatan di mana peran manusia sedikit banyak digantikan oleh teknologi. Bahkan dalam era otonomi saat ini, setiap daerah memiliki kearifan local yang harus dipelihara dan diwariska kepada generasi penerus. (Syafaruddin, 2018, p. 4)

Program pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan membutuhkan bimbingan dan pengawasan (supervisi). Konsep lama supervise mengarah kepada upaya pekerjaan yang bersifat tradisional, yaitu mencari celah kesalahan untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan. (Piet A., 2020, p. 16). Kegiatan pengawasan/ supervisi dalam lembaga sebagai kegiatan penting dalam rangka tercapainya tujuan penyelenggaraan pembelajaran. Kegiatan kepengawasan yang dimaksud yaitu langkah gerak dalam upaya mengarahkan, membina, membimbing dan mengawasi tercapainya mutu dan tujuan pendidikan dari segi input, proses, maupun hasil. Oleh karena itu, pengawasan dalam lembaga pendidikan terjadi mulai dari tahap perencanaan hingga kepada tujuan dan evaluasi guna mendapatkan perbaikan arah pendidikan yang lebih baik dari masa ke masa. (Kementerian Agama RI, 2020, p. 22)

Tugas pengawasan adalah memfasilitasi proses pembelajaran sehingga dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Perspektif pengawasan perlu melepaskan diri dari pemikiran kaku dan ekspektasi profesional tentang pengawasan yang tepat yang tidak terbatas pada ruang dan waktu serta belenggu legitimasi struktur (Thorndahl & Frandsen, 2022, p.105). Sehingga variabilitas yang cukup besar dalam melakukan pengawasan di lapangan tentang bagaimana cara pengawas mendukung guru dalam pengalaman lapangan (Wilhelm et al., 2023). Sehingga upaya dalam melakukan pengawasan menggunakan model action research dengan teknologi pendidikan (Mapotse, 2014). Apalagi supervise manajerial ,menghadapi

tantangan di masa pandemi covid-19, juga mengalami hambatan komunikasi secara langsung (Fendi et al., 2021).

Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dinilai berhasil jika didukung oleh kemampuan pengawas dari segi kompetensi dan kualifikasi sesuai peraturan perundangan. Oleh karena itu, proses “untuk menjadi pengawas profesional tidak mudah, karena banyak kriteria dan persyaratan yang harus dimiliki oleh calon pengawas”. Syarat dan Indikator pengawas profesional harus memiliki kompetensi, sertifikasi dan kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan Permendiknas RI. Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah menetapkan bahwa pengawas harus memiliki enam dimensi kompetensi yaitu “Kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.” (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Madrasah, 2007, p. 4–6)

Akhir-akhir ini lembaga pendidikan kembali harus menyesuaikan dengan aturan baru Pemerintah tentang perubahan kurikulum, yaitu kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Sebelumnya, Orientasi Kurikulum 2013 sebagaimana amanat UU No. 20 tahun 2003 “terjadi peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (*attitude*), keterampilan (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*).” Di mana, penjelasan Pasal 35, yaitu: “kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.” Meneruskan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sebelumnya output pendidikan terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara menyeluruh.

Pelaksanaan pendidikan karakter sebagai pelaksanaan Kurikulum 2013 terintegrasi dalam setiap bidang studi yang ada di kurikulum. Mulai dari materi-materi tentang norma atau nilai-nilai pada setiap program studi yang diajarkan diintegrasikan dengan perilaku kehidupan nyata. Sehingga arah *value education*, dan *character building* tidak hanya aspek pengetahuan, namun meliputi penggabungan dalam diri dan implementasi riil dalam kegiatan *everyday life* peserta didik (Mulyasa, 2015, p. 7).

Generasi bangsa diharapkan mampu melakukan inovasi secara produktif dalam menjawab tantangan yang akan datang sebagaimana cita-cita kurikulum 2013 yaitu “lahirnya generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif dan berkarakter.” Guna menghasilkan generasi bangsa yang “produktif, kreatif, dan inovatif, serta dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional” untuk membentuk kepribadian bangsa yang bermartabat sebagai factor kunci kesuksesan. (Rusman, 2009, p. 6) Kunci sukses tersebut terdiri dari manajemen kepemimpinan kepala sekolah, kreatifitas guru dalam mengajar, kegiatan peserta didik, sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan yang mendukung kegiatan akademik, dan peran serta warga sekolah. Sehingga output dari kurikulum 2013 diharapkan mampu mengatasi persoalan bangsa dan mengembangkan sumberdaya manusia yang produktif

dan inovatif dengan mempersiapkan peserta didik berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari setiap system pendidikan yang berjalan (Irawan & Handayani, 2022, p.14 ).

Pengembangan kurikulum PAI dan karakter terdiri dari 5 komponen di antaranya, yaitu pertama, tujuan kurikulum pendidikan agama Islam dan akhlak ini menekankan pada pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia dan taat beragama. Kedua, materi dalam kurikulum mengembangkan tiga ranah yaitu ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, Strategi/metode harus menggunakan pendekatan kurikulum ilmiah. Keempat, organisasi kurikulum yang dikembangkan adalah model kurikulum terpadu. dan Kelima, kegiatan evaluasi mencakup tiga domain.

Konteks Madrasah Ibtidaiyah, supervisi manajerial memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas bimbingan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pengawas Madrasah (Sucipto, 2019, p.2). Dampak supervisi manajerial terhadap kinerja pengawas ini merupakan bidang studi yang signifikan, karena secara langsung mempengaruhi keseluruhan fungsi dan keberhasilan Madrasah Ibtidaiyah (Iskandar & Putri, 2020; Ruhayat, 2017). Penting untuk dicatat bahwa pengawasan manajerial dilakukan oleh pengawas Madrasah sendiri, yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasional dan kegiatan sehari-hari di Madrasah (Prayuda, 2022). Oleh karena itu, memahami dampak supervisi manajerial terhadap kinerja para pengawas ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen di lembaga Madrasah Ibtidaiyah. (Aqib, 2009, p.23).

Berdasarkan pengalaman yang dirasakan oleh penulis selaku salah satu kepala Madrasah Ibtidaiyah swasta di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan pada pengawas madrasah pada kelompok kerja pengawas Kantor Kementerian agama kabupaten Magetan, bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan yang dilakukan pengawas madrasah sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal. Hal ini juga disampaikan oleh sebagian pengawas madrasah pada setiap rapat/pertemuan KKM bahwa Pengawas Madrasah belum melaksanakan supervisi manajerial secara rutin dan berkesinambungan. Hal itu dikarenakan kurangnya SDM pengawas. Mengacu pada Buku Kerja Pengawas bahwa Jumlah ideal madrasah binaan adalah 9-11 lembaga, namun berdasar pengakuan pengawas madrasah ibtidaiyah kabupaten Magetan menyampaikan bahwa jumlah pengawas madrasah ibtidaiyah hanya berjumlah 6 orang. Pengawas madrasah ibtidaiyah yang berjumlah 6 orang tersebut harus membina sebanyak 89 Madrasah Ibtidaiyah.

Berdasarkan paparan diatas menunjukkan bahwa pengawas madrasah sudah sudah melaksanakan supervisi tetapi belum maksimal. Pengawas Madrasah belum melaksanakan supervisi manajerial secara rutin dan berkesinambungan.

Tugas supervisi pengawas secara umum terdiri dari dua poin yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Kajian dalam tulisan ini adalah supervisi manajerial pengawas madrasah terhadap kepala madrasah ibtidaiyah. Berdasar paparan latar belakang tersebut di atas peneliti hendak mengkaji kembali terkait dengan **“Manajemen Supervisi Manajerial**

**Pengawas Madrasah Ibtidaiyah di Wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan”.**

**B. Rumusan Masalah**

Mengingat kajian latar belakang di atas, dapat peneliti rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen supervisi manajerial Pengawas Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat manajemen supervisi manajerial Pengawas Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam manajemen supervisi manajerial Pengawas Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan ?

**C. Tujuan Penelitian dan Manfaat**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Mendeskripsikan tentang manajemen supervisi manajerial Pengawas Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan
- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen supervisi manajerial pengawas Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan

- c. Mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan dalam manajemen supervisi manajerial pengawas Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dukungan riset dalam *science development* dalam bidang administrasi dan supervisi pendidikan, dan diharapkan dapat memberikan sudut pandang keilmuan lain, khususnya yang berkenaan dengan implementasi kepengawasan supervisi manajerial.
- b. Secara praktis
  - 1) *Upgrade* cakrawala pengetahuan penulis dan peningkatan keilmuan khususnya tentang supervisi manajerial Pengawas Madrasah.
  - 2) Membantu Pengawas madrasah dengan riset ini sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kepengawasan yang selama ini telah dilaksanakan dan menjadikan pengawas madrasah mau meningkatkan proses supervisi terutama supervisi manajerial supaya tujuan pendidikan yang dicapai madrasah dapat maksimal.
  - 3) Membantu alternative wawasan Kepala Madrasah, dalam evaluasi peran kepala madrasah yang juga sebagai supervisor terhadap guru, dan menjadikan kepala madrasah mau meningkatkan proses



manajerial supaya tujuan lembaga madrasahnya dapat tercapai dengan maksimal.

- 4) Mendukung guru dan tenaga pendidikan, menggunakan hasil riset ini sebagai evaluasi dan pembenahan terstruktur terhadap kompetensi akademik yang dimiliki supaya termotivasi untuk mengembangkan kompetensinya menjadi lebih baik.
- 5) Bahan masukan serta informasi bagi semua pihak (khususnya pembaca) yang terlibat dalam pelaksanaan supervisi pengawas dalam upaya meningkatkan kompetensi supervisi manajerial pengawas madrasah.

